

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Badan Legislasi DPR RI, 2013. *Naskah Akademik RUU Jabatan Notaris 2014*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. Tanpa tahun. *Bahan Kuliah Politik hukum Pidana.Handout*. Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Jakarta: Kencana.
- , 2011. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana.
- Darwan Prints, 2001. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E. Utrecht, 1958. *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta.
- , 1960. *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM) Press.
- , 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Eddy O.S Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta,: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Gronwet van de Republiek Indonesie*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Voeve, 1998.
- Fernando M Manulang, 2007. *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Gregor Polancik, 2009. “*Empirical Research Method Poster*”. Jakarta.
- H. Budi Untung, 2002. *Visi Global Notaris*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- Herlien Budiono, 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*, Medan: Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia.
- Husaini Ustman dan Purnomo Setiady Akbar, 1998. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- I Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Pers.
- , 2011. *Perihal Undang-Undang*, edisi revisi., Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini Soedjendro, 2001. *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Koeswadji, 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Komar Andasasmita, 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajibannya, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Penerbit Sumur.
- Komar Andasasmita, 1991. *Notaris I*, Bandung: Penerbit Sumur.
- Liliana Tedjosaputro, 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Maria Farida Indrati S, 2012. *Ilmu Perundang-undangan : Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, Yogyakarta: Kanisius.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Matome M. Ratiba, 2013. "Convecaying Law For Paralegals and Law Students", bookboon.com.
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Adam, 1995. *Asal Usul dan Sejarah notaris*, Bandung: Sinar Baru.
- Munir Fuady, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Huda dan R Nazriyah, 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Prakoso dan Nurwachid, 1984. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982. *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: C.V. Rajawali.
- Rachmat Setiawan, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni.
- Riduan Syahrani, 1998. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soejono, 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, 2008. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, 2007. *Tanggapan Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), MKn USU.
- Susilo Yuwono, 1992. *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*, Bandung: Alumni.
- Taliziduhu Ndraha, 1985. *Research, Teori, Metodologi, Administrasi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- , 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta:Media Perkasa.
- , 2017. *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers.
- Theo Huijbers, 1990. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta:Kanisius.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Banjarmasin: Unila.
- Yuliandri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1, 2015.
- G.A. Nasir "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Hukum Replik*. Vol.5.No.2. 2017.

Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, artikel dalam Jurnal Lex Renaissance, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017.

Mardiyah, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang- Undang Jabatan Notaris”, tesis yang diterbitkan menjadi artikel dan dimuat dalam Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan “A c t a C o m i t a s” (2 0 1 7), hlm 110 – 121.

Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, *Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, Jurnal Akta Vol 5 No.1, Maret 2018.

Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, artikel dalam Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.3.No.3. Tahun 20123.

Tiska Sundani, “Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik”, dalam Premise Law Jurnal, Volume 1, 2017, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16881> diakses pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 21.35 wita.

Zainatun Rossalina dkk, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, artikel dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554>

Disertasi Dan Tesis

Irene Dwi Enggarwati, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

Internet

Andri Lamoji, *Pengertian, Tujuan, Jenis dan Macam-Macam Pembagian Hukum*, ([https:// andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/](https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/)), diakses 25 Juni 2021 pukul 15.35 wita.

Amrie Hakim, *Unsur-Unsur Pidana yang Dihadapi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5135/unsur-unsur-pidana-yang-dihadapi-Notaris-dalam-menjalankan-jabatannya>), di akses 26 Juni 2021 pukul 20.15 wita.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae3533608c15b730d284af2eef5f62f8.html>. Data akses 1 Juli 2021 pukul 21.35 wita.

<https://suksesinews.net/detailpost/palsukan-dokumen-jual-beli-tanah-Notaris-ini-divonis-2-5-tahun> (11/09/2020) data akses 1 Juli 2021 pukul 21.40 wita.

Imam Nasima, *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, (www.hukumonline.com), diakses 25 Juni 2021 pukul 15.50 wita.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-Notaris-ke-pusaran-kasus/> (11/05/2016). Data akses 29 Agustus 2021 pukul 22.15 wita.

Majalah Renvoi, Nomor 2,14,II 3 Juli 2004.

Wawan Setiawan, *Notaris Profesional*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004.

<https://kbbi.web.id/atur>. Data akses Jumat 12 November 2021 pukul 21.15 wita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai "Public Official". Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 [mk/mk_9_14_2005.pdf](#) diakses pada tanggal 7 Agustus 2021. .